

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak – pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito *et al*, 2008).

Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Oleh sebab itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan dengan proses yang memberikan jaminan keterandalan penyajiannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta pelaporannya dapat berguna dalam pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Pada tanggal 1 Januari 2001 telah dilaksanakannya otonomi daerah. Pemerintah melakukan perubahan dalam bidang fiskalnya dari sistem sentralisasi

menjadi sistem desentralisasi. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, saat ini undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah (SKPD) mempunyai kewenangan untuk menyusun laporan keuangan daerah. Suatu penyusunan pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh adanya kapasitas sumber daya manusia yang terampil, tingkat pengendalian intern akuntansi yang efektif, sistem teknologi informasi yang canggih, serta adanya pengawasan keuangan didalam instansi pemerintahan daerah tersebut. Jika semua faktor tersebut sudah terpenuhi, maka terciptalah sebuah keterandalan dalam pelaporan keuangan. Sehingga terwujudlah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*).

Menurut Desmiyawati (2012) Keterandalan adalah Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang ada didalam organisasi. Menurut Wiley (2002:3) dalam Azhar (2007) Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, organisasi harus memiliki SDM yang profesional dan berkualitas agar laporan dapat disusun

dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian dirubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Wilkinson *et al* (2000) dalam Indriasari (2008) menyebutkan komponen dari aktifitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah perancangan yang memadai, penggunaan dokumen-dokumen, catatan-catatan bernomor, pemisahan tugas, otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, pemeriksaan independen atas kinerja, dan penilaian yang sesuai / tepat atas jumlah yang dicatat.

Menurut Yosa (2010) dalam Dian (2014) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar

pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Maka hubungan masing-masing variabel terhadap keterandalan pelaporan keuangan yaitu, kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan, dengan kita melakukan pemanfaatan teknologi informasi akan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern akan dapat membantu keterandalan pelaporan keuangan, dan untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan yaitu pengawasan keuangan daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dhan Apriyansyah pada tahun 2010 dengan judul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Bengkulu). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan

teknologi informasi, dan kapasitas SDM tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Astuti Purnama Sari pada tahun 2012 dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan dan pengendalian intern terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati pada tahun 2010 dengan judul pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di Pemda Subosukawonosraten). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif.

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah (Puput, 2017). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan:

Faktor pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk mencegah kegagalan dalam penyusunan laporan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti yang diutarakan oleh Warisno (2008) bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah pada pemahaman dan penerapan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, yang dilihat pada sumber daya manusia tersebut adalah kinerjanya.

Berdasarkan penelitian Indriasari (2008) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Dian Tri Anggraeni (2014) di Kabupaten Sidoarjo kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Faktor kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penelitian Celviana (2010) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Dian Tri Anggraeni (2014) di Kabupaten Sidoarjo pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Faktor ketiga adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan penelitian Dhan Apriyansyah (2010) sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Dian (2014) menemukan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Faktor keempat adalah pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian Wheny (2015) “menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan mengingat pentingnya keterandalan pelaporan keuangan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kekeliruan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dian Tri Anggraeni (2014) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Sidoarjo), karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Tri Anggraeni (2014) dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada lokasi yang

berbeda yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dipilihnya objek penelitian di instansi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi karena terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun-tahun sebelumnya 2012-2015, sedangkan pada tahun 2009-2010 BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2011 BPK memberikan opini WTP-DPP atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk LKPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu: 1) pengendalian dan manajemen kas belum optimal serta realisasi belanja atas iuran asuransi kesehatan/BPJS tidak menggunakan mekanisme surat perintah pencairan dana (SP2D) dan, 2) pengamanan barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen administrasi yang memadai. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu: 1) uang persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2014 terlambat disetor dan, 2) belanja perjalanan dinas luar daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat DPRD berindikasi kemahalan harga dan tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatasdan hasil penelitian peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul maka penelitian ini dilakukan di salah satu Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Skpd Kabupaten Kuantan Singingi).**”

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusiaterhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b) Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasiterhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- c) Bagaimana pengaruh pengendalian intern akuntansiterhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- d) Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerahterhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- e) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalahuntuk menganalisis secara empiris faktor – faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kontribusi Praktis

Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan di instansi pemerintah daerah.

2) Kontribusi Teoretis

a. bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.

b. bagi pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

3) Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi/keuangan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat telah disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1) Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian hanya fokus pada pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, teknologi informasi, dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang keadaan umum Kabupaten Kuantan Singingi, dan sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.